

UTOPIA MODERNITAS: Pembangunanisme, Netralitas Negara, dan Demokrasi Ekonomi

Oleh:

Marianus Ola Kenoba¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores Ende

¹marianuskenoba64@gmail.com

Abstrak

Konsep pembangunan lahir dari keprihatinan moril negara-negara maju atas kondisi sosial dan politik ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Namun, pembangunan yang diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi (ekonomi) tersebut justru berkembang ke arah ketergantungan struktural. Manuskrip paper tekstual ini bertujuan untuk memperlihatkan dimensi utopia dalam konsep pembangunan, netralitas negara, dan “politik” demokrasi ekonomi. Riset tekstual ini menggunakan metode hermeneutika kritis aliran Gadamerian. Pilihan logis terhadap metode hermeneutis kritis, bertolak dari fakta bahwa seluruh data di dalam riset ini bersumber dari teks-teks tertulis. Kategori teks tertulis berupa *text book* dan paper-paper jurnal yang relevan. Sumber data diperoleh dari perpustakaan, jurnal nasional berreputasi, dan jurnal internasional. Sesudah data tersedia, langkah selanjutnya adalah tindakan pembacaan secara kiritis atas teks dan mendeskripsikan kembali hasil pembacaan tersebut secara logis. Riset tekstual ini menemukan bahwa konsep pembangunan merupakan bagian dari utopia yang ditawarkan oleh negara-negara maju. Konsep pembangunan yang mulanya dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, justru berubah menjadi ideologi penguasaan. Lebih dari itu, posisi manusia adalah obyek ekspansi pasar di dalam keseluruhan desain proyek pembangunan. Jadi, ideologi kapitalisme moderen telah menggiring manusia pada problem keterasingan yang bersifat eksistensial.

Kata Kunci: Pembangunan, netralitas negara, demokrasi ekonomi, ketergantungan, kapitalisme global.

A. PENDAHULUAN

Aliran pemikiran sosiologi struktural fungsional mengkonstruksi masyarakat sebagai sebuah sistem makro yang melayani, bahkan secara sistemik mempurifikasi sistem tersebut agar menghindari potensi konflik yang bercorak laten maupun manifest (Ritzer, & Stepanisky, J. 2017; Coser, (Ed.), 2017; Turner, 1978). Konflik laten maupun manifest dipandang sebagai “virus” yang dapat merusak keseimbangan sistem sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, apabila ada gangguan pada sebuah sistem, maka akan mengganggu bekerjanya fungsi sistem yang lainnya (Giddens, 1987; Etzkowitz, & Glassman, 1991). Jadi, masing-masing elemen institusional memiliki keterkaitan secara fungsional sehingga saling mengandaikan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya (Layder, 2005). Salah satu sistem makro yang secara struktural diakui legalitasnya adalah institusi atau pranata negara. Institusi negara secara “naïf” diimajinasikan sebagai sebuah lembaga yang netral atau bebas dari tendensi nilai apa-pun (Budiman, 1996). Cara pandang yang memosisikan negara sebagai institusi yang netral tersebut, sebetulnya tidak selalu memadai karena di dalam sistem itu sendiri telah “bersemayam” nilai-nilai ideologis tertentu.

Beragam telaah berkenaan dengan aspek ideologis, teori, fungsi, serta eksistensi negara telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan sosial. Analisis ilmuwan sosial ini membantu *ordinary people's* untuk menalar eksistensi lembaga negara. Dalam perspektif sosiologis, negara merupakan institusi sosial yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Persis pada tataran fungsional ini-lah sebetulnya secara eksplisit mengandaikan legitimasi

kekuasaan dan wewenang negara. Term legitimasi terhadap otoritas negara, telah menjadi titian bagi bekerjanya “efek” hegemoni terhadap publik (rakyat). Efek hegemoni memungkinkan publik (rakyat) menerima secara begitu saja (*taken-for-granted*) otoritas negara sebagai sebuah pranata tunggal yang seolah-olah netral dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Laclau, E., & Mouffe, C. 2014).

Proses produksi dan distribusi pengetahuan baru mengenai era modernisme menandai loncatan baru di dalam sejarah peradaban umat manusia. Peradaban modernisme disertai slogan efisiensi, efektivitas, dan kemajuan yang dipopulerkan oleh negara-negara maju telah menemukan titik pijak legitimasi yang kokoh (Sztompka, 2014). Representasi legitimasi otoritas negara-negara maju dapat teridentifikasi melalui kebijakan negara-negara di dunia ketiga untuk mengadopsi konsep pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dipacu sedemikian rupa agar menyerupai standar kemajuan yang dianut oleh negara-negara maju. Dan, Indonesia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya dikategorikan sedang berkembang merespon formula kemajuan (ekonomi) yang ditawarkan oleh negara-negara maju.

Tawaran dan lebih-lebih keprihatinan etis negara-negara maju terhadap fenomena kemiskinan yang melilit masyarakat di negara sedang berkembang, perlu diapresiasi secara politis dan positif. Betapa-pun demikian, manuskrip paper ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menarasikan suksesnya “proyek” pembangunan(-isme). Paper tekstual ini bertujuan untuk memperlihatkan aspek idologis dari konsep pembangunan, problematika netralitas negara, dan patologi ketergantungan struktural yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) terhadap ideologi kapitalisme di Eropa dan Amerika.

B. METODE PENELITIAN

Riset ilmiah ini menggunakan metode hermeneutik kritis. Opsi terhadap metode hermeneutis kritis ini dilatari oleh argumentasi dasar bahwa seluruh data di dalam riset ini bersumber dari teks-teks tertulis. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode pembacaan kritis atas teks-teks yang relevan. Sesudah materi tersebut dibaca secara kritis, kemudian dilakukan interpretasi kritis terhadap seluruh materi yang ada. Moment interpretasi tekstual mengandaikan pemanfaatan kerja-kerja metodis hermeneutis (Bakker, 1986). Secara historis, perkembangan gagasan hermeneutika berada dalam “frame” dua aliran pemikiran yang saling berlawanan, namun sekaligus saling mengandaikan.

Dua kutub perdebatan pada level epistemologis tersebut yakni aliran intensionalisme pada satu sisi dan aliran hermeneutik Gadamerian pada sisi yang lainnya. Aliran intensionalisme bertolak dari asumsi bahwa makna sebuah teks sudah ada karena sudah dibawa oleh pengarang atau penyusun teks sehingga tinggal menunggu interpretasi dari penafsir (Bleicher, 2017). Sebaliknya, hermeneutika Gadamerian bertolak dari asumsi bahwa makna tekstual dicari, dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai dengan konteks penafsir (Bertens, 2002). Makna tekstual tidak pernah bersifat final, ia senantiasa tergantung pada konteks penciptaan teks. Sementara itu, peristiwa pemahaman terjadi ketika adanya titik temu cakrawala tempat karya itu berada (Hardiman, 2015; Sumaryono, 1993). Dalam konteks historis, gagasan hermeneutika menempatkan sejarah itu sendiri sebagai medan dialog hidup antara masa lalu, masa kini, masa akan datang. Metode hermeneutik mencoba menyesuaikan setiap elemen dalam setiap teks menjadi satu keseluruhan yang lengkap, dalam sebuah proses yang biasa dikenal sebagai lingkaran hermeneutik (Hardiman, 2003).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunanisme

Memasuki vase peradaban modernisme, pembangunan menjadi semacam magnet tersendiri bagi negara-negara *underdevelopment*. Warga negara yang berdomisili di negara yang teridentifikasi *underdevelopment* ini, dibayangkan masih hidup dalam tekanan kemiskinan struktural yang sangat parah (Songsore, 2020). Atas dasar itu-lah, negara-negara

miskin di dunia ketiga direkomendasikan untuk mengadopsi konsep *development* (pembangunan). Dengan demikian, variabel utama yang ditawarkan di dalam konsep pembangunan adalah indeks pertumbuhan ekonomi (Maryolo, 2018). Menurut sejarahnya, sebagai sebuah tawaran konseptual, konteks konsep pembangunan itu sendiri mulanya dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Trumann.

Konsep pembangunan terungkap dalam salah satu pidato Harry S. Trumann mengenai visi kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Dalam rangka merealisasikan visi kesejahteraan dunia ini-lah lahir pula segregasi term antara *development* dan *underdevelopment* yang menjadi populer pada tahun 1950-an. Term *development* disematkan pada negara-negara maju di Eropa dan Amerika yang dijadikan sebagai “kiblat”. Sebaliknya, term *underdevelopment* ditujukan spesifik bagi negara-negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Budiman, 1989). Betapapun demikian, pada level operasionalnya, konsep *underdevelopment* (keterbelakangan) ini banyak menuai polemik. Polemik lebih terarah pada dimensi *hidden transkrip* atau bias-bias ideologis yang berada di balik “proyek” pembangunan. Bias ideologis itu, terungkap dalam kenyataan bahwa proyek pembangunan bukanlah solusi alternatif bagi problem kemiskinan. Proyek pembangunan justru semakin memperburuk keadaan ekonomi di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara terbelakang itu (Dube, 2019); Lin, 2022).

Konsep pembangunan memang memiliki basis sejarah (politik) ekonomi, yang dikembangkan di dunia Eropa terutama Amerika. Dengan demikian dalam kalkulasi proyek pembangunan-pun, dengan serta merta *mencoppy-paste* formula ideks pertumbuhan ekonomi yang telah dipraktekan oleh negara-negara maju. Asumsi dasar di balik agenda-agenda pembangunan adalah “keprihatinan” negara-negara maju terhadap tingkat kesejahteraan di negara-negara dunia ketiga yang umumnya miskin secara ekonomi. Dalam perspektif Eropa dan Amerika, warga masyarakat yang tinggal di negara-negara terbelakang, hidup dalam struktur ekonomi yang kurang menguntungkan. Menghadapi situasi struktural semacam ini, maka diperlukan sebuah desain kebijakan politik (ekonomi) yang lebih humanis dan demokratis. Desain kebijakan yang humanis itu termanifestasi dalam konsep pembangunan, dengan maksud mendongkrak pertumbuhan ekonomis di belahan dunia yang diasumsikan masih terkebelakang (Ozoigbo, 2019).

Kebijakan pembangunan adalah mega proyek yang digarap sungguh-sungguh oleh negara-negara maju yang tersebar di Eropa maupun di Amerika. Desain awal proyek pembangunan dipersiapkan secara relatif matang. Misalnya, ketersediaan perangkat teknologi, upaya alih teknologi, ketersediaan “stok” dana pinjaman untuk membiayai proyek pembangunan, “resep-resep” teoritis, dan pertukaran tenaga profesional (*expert*) di bidangnya masing-masing. Lebih jauh lagi, perangkat pengetahuan melalui institusi pendidikan juga menjadi sarana intelektual yang dapat diandalkan. Dalam kasus transfer pengetahuan, dilakukan melalui penyebaran wacana teoritik mengenai konsep modernisme yang bersumber dari karya-karya klasik sosiolog Alex Inkelas. Sementara itu, teori mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, diadopsi secara utuh dari gagasan Rostow. Kemudian, gagasan teori David McLelland mengenai “virus” *N-Ach* menjadi sarana yang paling ampuh untuk “menaklukan” budaya malas yang menjadi ciri keterbelakangan (Budiman, 1996.;Setiawan, 2019). Dengan demikian, keterlibatan praksis kaum akademisi dalam disiplin ilmu-ilmu sosial menjadi batu loncatan yang paling strategis untuk merealisasikan agenda-agenda pembangunanisme.

Penaklukan wacana teoritis melalui konsep modernisme dan berbagai “kemudahan” di dalamnya, menemukan saluran definitifnya lewat regulasi-regulasi formal. Regulasi tersebut dapat teridentifikasi melalui *policy* negara-negara sedang berkembang untuk segera mengeksekusi proyek pembangunan. Tidak berlebihan jika pertumbuhan ekonomi

dipaksakan sedemikian rupa agar garis kurva permintaan dan penawaran (barang & jasa) memperlihatkan ciri signifikansinya.

Indonesia sebagai negara yang baru lahir sekaligus sedang berkembang, merupakan salah satu negara target ekspansi proyek pembangunanisme (Setiawan, 2019). Pemerintah negara Indonesia merespon proyek pembangunan ala Eropa dan Amerika tersebut melalui program yang dimodifikasi secara *incremental* yakni Rencana Pembangunan “Bertahap” Lima Tahun (REPELITA). Memang, secara historis harus diberi catatan khusus bahwa penerapan kebijakan politik ekonomi pada rezim Soekarno belum menemukan titik pijak yang kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan faktual bahwa negara sedang dalam masa transisi sehingga masih membutuhkan keamanan dalam negeri. Betapapun demikian, kebijakan politik rezim Soekarno bukanlah opsi terbaik. Kemiskinan struktural, kemelaratan, dan kebutaan negosiasi politik adalah implikasi logis atas kebijakan politik rezim. Pilihan kebijakan rezim Soekarno saat itu, memang cukup berisiko sebab orientasi kebijakan politik semata-mata terarah pada tuntutan kebutuhan politik praktis. Akibatnya, kebutuhan riil sektor ekonomi sosial masyarakat menjadi terabaikan. Kondisi pelik ini diperparah lagi dengan munculnya fakta bahwa sebagian kelompok elit politik yang dekat dengan sumber kekuasaan, hidup dalam kelimpahan harta. Sementara itu, pada level masyarakat akar rumput, hidup dalam himpitan ekonomi yang sangat parah.

Sebaliknya dalam penguasaan rezim Soeharto, pilihan *policy* tidak lagi berkuat pada perjuangan politik praktis. Jadi, pilihan kebijakan lebih terarah pada sektor-sektor ekonomi riil. Pilihan kebijakan yang memposisikan ekonomi sebagai panglima sebetulnya tidak didasarkan pada pertimbangan yang sifatnya kebetulan semata. Sebab, dalam masa awal kekuasaan rezim Soeharto, politik ekonomi ala Barat (*developmentalism*) sedang dipropagandakan dengan begitu gencarnya. Gayung-pun bersambut karena kondisi riil masyarakat masih dalam masa transisi. Maka, ide tentang pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan oleh negara-negara maju menjadi pilihan yang paling rasional. Negara, beserta seluruh aparatusnya secara maksimal mendukung program pembangunan yang diagendakan secara periodik oleh rezim Soeharto. Harus diakui bahwa pada masa pemerintahan rezim Soeharto, pembangunan di Indonesia menjadi trend tersendiri yang secara kuantitas dinilai berhasil.

Meskipun demikian, konsep *developmentalisme* yang ditawarkan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika, bukan tanpa resiko dan bebas dari pretensi nilai. Indeks pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan medium untuk merealisasikannya. Salah satu instrument yang dijadikan fondasinya adalah pasar yang *nota bene* berkaitan erat dengan sistem perdagangan internasional. Pada titik ini-lah, ideologi kapitalisme dengan percepatan akumulasi modal sebagai targetnya menemukan formulanya yang paling utuh (Priyono, 2016). Padahal, negara-negara terkebelakang termasuk Indonesia belum memiliki modal serta persiapan infrastruktur yang cukup memadai untuk memasuki lingkaran sirkulasi modal secara internasional.

Implikasi logis atas pilihan *policy* pembangunan, sungguh dirasakan pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Orientasi kebijakan yang berorientasi pada bidang ekonomi, telah melahirkan berbagai problem sosial dan kultural yang demikian pelik. Beragam problem ini-pun belum menemukan solusi yang tepat untuk segera ke luar dari krisis ekonomi-politik yang berkepanjangan. Kemelaratan hidup, fenomena konsumerisme, krisis identitas budaya, serta utang luar negeri yang semakin membengkak secara gamblang mendeskripsikan potret suram; betapa kita hidup dalam ketergantungan dan ketakberdayaan yang bersifat struktural. Pada tataran inilah justru letak kelemahan konsep pembangunan sebab sejarah peradaban secara ekonomis memang tidak selalu sama. Masing-masing negara

memiliki kondisi material serta sejarah ekonomi yang berbeda (Hettne, 2001) belum lagi menyangkut penguasaan perangkat teknologi untuk mendukung percepatan ekonomi.

Netralitas Negara

Negara dalam pemahaman makro didefinisikan sebagai institusi yang netral dalam hal pelayanan publik. Legalitas negara dalam membuat *public policy* diterima secara *taken for granted* atau diterima secara begitu saja oleh masyarakat. Pemahaman yang cukup “naïf” tentang eksistensi, legalitas, fungsi, serta negara tersebut telah melahirkan bentuk ketidakadilan struktural. Sebaliknya, negara dalam kajian ilmu-ilmu sosial termasuk salah satu institusi sosial yang mau tak mau memiliki orientasi kepentingan yakni penguasaan atas publik. Dengan demikian, pandangan klasik mengenai kedudukan negara yang dianggap seolah-olah netral di atas segala kepentingan, barangkali harus dipertimbangkan kembali (Boudon, 1986). Sebab selama ini, hampir tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai atas fungsi negara sebagai salah satu lembaga penyelenggara kepentingan publik.

Secara teoritis, kompleksitas netralitas negara dalam menjalankan fungsi pelayanan serta kebijakan publik mengundang diskusi yang mendalam. Misalnya, di dalam pandangan filsuf Karl Marx, institusi negara memiliki keberpihakan pada kelompok tertentu dalam hal ini kelompok dominan (Suseno, 1999). Negara bagi Marx dan Marxian, dipandang sebagai sarana instrumental bagi kelompok penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan menikmati sekian banyak kenikmatan secara sosial. Cara pandang semacam ini mau mempertegas tesis yang diajukan oleh Karl Marx bahwa posisi negara dan kebijakannya tidak pernah netral lagi sebab negara hanya difungsikan sebagai *ancilla* (pelayan) atas kelompok dominan yang memiliki akses modal yang kuat.

Terminologi gagasan Karl Marx ini, dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menganalisis kebijakan politik ekonomi di Indonesia. Kebijakan tentang Mobil nasional yang pernah hadir di Indonesia misalnya, merupakan representasi dari ketidaknetralan negara dalam hal penentuan kebijakannya. Proteksi ekonomi dengan basis argumentasi yang kurang mengakar yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu probem dari sekian banyak problem lainnya yang menggumpal bagai benang kusut. Pertanyaan bisa saja muncul, untuk kebutuhan siapakah mobil nasional diproduksi?. Dalam perspektif Karl Marx, pertanyaan ini bisa dengan segera dijawab; untuk kebutuhan kelompok pemilik modal dan yang memiliki kekuasaan. Dari studi kasus ini, dapat diungkapkan bahwa negara hanya titian bagi kelompok pemilik otoritas (penuh) dan elit-elit pemilik modal untuk merealisasikan kepentingannya.

Atas dasar itu-lah, kebijakan negara (pemerintah) berkenaan dengan politik ekonomi, tentunya berhimpitan dengan kepentingan agen-agen kapital yang sekaligus memiliki otoritas kuasa. Dari pengalaman ini, menjadi semakin jelas bahwa logika kapitalisme telah memasuki wilayah kebijakan ekonomi nasional. Ironisnya, logika kapitalisme sungguh bermetamorfosa menjadi kekuatan hegemonik dan akan berjalan sesuai dengan logikanya sendiri dan lepas dari kontrol manusia. Jika situasinya demikian, maka kondisi publik (masyarakat) terjerumus masuk ke dalam dilema psiko-sosial yang pernah diramalkan oleh Marx yakni alienasi atau keterasingan (Mandel & George Novak, 1970). Kerja dalam pengertian dunia ekonomi menjadi kehilangan pesona dan hanya sebagai instrumen untuk pemenuhan kebutuhan akumulasi modal bagi para pemilik modal semata.

Analisis kritis atas keberpihakan negara terhadap kelompok kelas dominan yang telah ditelaah oleh Marx kemudian dilanjutkan oleh Louis Althusser seorang penganut gagasan Marxis struktural. Menurut Althusser, negara memiliki otoritas spesifik untuk melakukan represi terhadap publik. Dengan demikian, dalam menjalani pelayanan publik negara memiliki “watak” dominasi. Perwujudan “watak” dominasi ini, bisa saja lewat jalan *coersif* atau paksaan maupun melalui manipulasi kesadaran intersubyektivitas manusia (Payne, 1997). Sebagai sarana penindasan, eksistensi negara dapat dikatakan sebagai alat perjuangan kelas. Tesis mengenai negara sebagai “corong” perjuangan kelas ini, sejalan dengan konsep

Marx mengenai stratifikasi kelas dalam masyarakat dan upaya perjuangan kelas. Meskipun demikian, analisa Althusser ternyata jauh melampaui premis-premis dasar pembagian kelas dalam konteks pemikiran Marx.

Karl Marx dan pengikutnya sebetulnya hanya memfokuskan kajian pada aspek politik praktis yakni perjuangan kelas semata. Bahkan, ada semacam purifikasi dalam gagasan teori Marx bahwa seluruh dinamika masyarakat ditentukan oleh basis ekonomi semata (Swingewood, 1975). Sikap apriori semacam ini memang menjadi berat sebelah. Atas dasar itu-lah, Althusser memulai analisisnya dengan bertolak dari sebuah tesis kunci bahwa negara memiliki kepentingan yang sifatnya ideologis. Konteks ideologi dalam terminologi pemikiran Althusser yakni bersifat menyejarah *omni-historis*. Artinya, sejarah diciptakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Berbeda dengan kerangka pemahaman Marx, yang menafsirkan esensi ideologi tanpa konstruksi sejarah atau *ahistoris*. Negara melalui aparatusnya melakukan tindakan represif dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai perancang kebijakan publik. Perangkat ideologi ini berupa penerapan norma-norma kemasyarakatan yang dalam konteks Indonesia bisa disamakan dengan penyebaran wacana kepentingan nasional; penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak. Bahkan, institusi pendidikan-pun dimanfaatkan “jasanya” untuk mendukung stabilitas negara.

Demokrasi Ekonomi

Demokrasi atau kesejahteraan rakyat merupakan konsep ideal yang ingin di perjuangkan oleh negara bangsa untuk mencapai standar kelayakan hidup sejahtera. Dengan demikian, demokrasi merupakan manifestasi riil peran lembaga negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Betapa-pun demikian, diskursus mengenai konsep maupun praksis demokrasi tidak pernah terlepas dari keputusan politik yang dirancang oleh aparatus negara. Aparatus negara, tentunya tidak “steril” dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Atas dasar itu-lah, konsep demokrasi di dalam pemahaman para pemikir postmodernisme dianggap sebagai bagian dari utopia karena nilai demokrasi tidak pernah bebas dari tendensi kepentingan politis.

Bahkan, Milton Friedman mengajukan argumennya yang cukup radikal bahwa demokrasi merupakan hasil dari ide-ide pasar bebas. Pemahaman yang sifatnya ekonomisentris ini, memang mengundang perdebatan yang panjang. Namun, kembali pada kelompok kelas dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Marx; barangkali dapat dirumuskan pertanyaan: demokrasi untuk kelompok sosial manakah?. Sebab pada tataran empirisnya, masing-masing kelompok sosial tidak memiliki akses ekonomi yang sama. Bagaimana-pun kelompok-kelompok sosial tetap terpolarisasi ke dalam kategori kepemilikan yang sejak masa pra-eksistensinya tidak pernah berimbang.

Demokrasi dalam konteks ini, barangkali diletakan dalam konteks sosio-ekonomis sebab term kesejahteraan akan berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat umum. Demokrasi yang diidealkan barangkali hanya sebagai “mimpi” paling tidak bagi pandangan kelompok postmodernisme yang selalu menaruh curiga pada konsep-konsep yang bersifat abstrak (Sugiharto, 2014); Sarup, 1993); McRobbie, 2003). Dalam konteks Indonesia; demokrasi Pancasila misalnya telah kehilangan maknanya yang esensial sebab telah mengandung bias ideologi yang sifatnya tertutup (Budiman, 1996). Dengan demikian; demokrasi Pancasila hanya menjadi instrumen politik bagi penguasa (ORDE BARU) untuk tetap mempertahankan *status quo*.

Sementara itu, struktur logika globalisasi telah memasuki segmen kehidupan kita yang bersifat paling *privacy* sekalipun. Globalisasi telah menghantarkan kita pada tahap kehidupan sosial yang semakin kompleks di samping itu resiko biaya sosial semakin tinggi sebab kita memasuki aliran politik ekonomi yang rumit (Giddens, 2003); Priyono, 2016). Globalisasi ekonomi adalah tuntutan zaman yang mau tak mau menghantarkan peradaban manusia pada gelombang kapitalisme moderen. Demokrasi ekonomi yang menjadi titik ideal,

pembangunan juga dipertimbangkan kembali sebab pada dasarnya dalam era modernisme ini, meminjam istilah Weber dunia telah kehilangan pesonanya (Weber, 2019) atau dalam istilah populer Anthony Giddens, *run way a worl*-dunia telah kehilangan kendali.

D. KESIMPULAN

Negara merupakan institusi sosial, yang memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Namun perlu juga dipertimbangkan bahwa sebagai sebuah bangunan sosial, negara memiliki kepentingan yang bersifat laten. Pada titik inilah kita dapat merefleksikan tentang berbagai fenomena sosial yang hadir dan diterima secara begitu saja. Pembangunan yang diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi (ekonomi) justru berkembang menjadi ideologi yang melahirkan kondisi ketergantungan yang sifatnya struktural sistematis. Sistem ideologi yang melahirkan petaka ketergantungan struktural yakni kapitalisme.

Sistem ideologi kapitalisme terbungkus rapih dalam kemasan baru yang diberi label pembangunanisme. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, merupakan salah satu akibat dari pilihan politis, ekonomi sebagai “panglima” dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan yang cerdas untuk mempertimbangkan model pembangunan yang lebih manusiawi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rancangan kebijakan untuk publik.

Konsep pembangunan yang mulanya dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, justru berubah menjadi tujuan penguasaan. Dengan demikian manusia adalah obyek ekspansi pasar untuk mendukung percepatan modal bagi negara-negara maju di Eropa maupun Amerika. Ketika manusia ditempatkan sebagai segmen pasar, maka manusia akan mengalami dilema paradoksal yakni problem keterasingan yang bersifat eksistensial. Lebih dari itu, proses dehumanisasi menjadi tidak terhindarkan lagi.

REFERENSI

- Bakker, A. (1986). *Metode-Metode Filsafat*. Ghalia Indonesia.
- Bertens, K. (2002). *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Gramedia Indonesia
- Bleicher, J. (2017). *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics As Method, Philosophy And Critique* (Vol. 2). Routledge.
- Boudon, Raymond; (1986). *The Analysis of Ideology*. The University of Chicago Press
- Budiman, A. (1989). *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Budiman, A. (1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Coser, L. A. (Ed.). (2017). *The Idea Of Social Structure: Papers in Honor of Robert K. Merton*. Routledge
- Dube, E. (2019). Rarity or reality of some theories of poverty in explaining the poverty in Africa. *Journal of Rural and Community Development*, 14 (3).
- Etzkowitz, H., & Glassman, R. M. (1991). *The Renascence of Sociological Theory*. Ithaca, Illinois: PE Peacock Publishers
- Giddens, A. (1987). *Social Theory and Modern Sociology*. Stanford University Press
- Giddens, A. (2003). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. Taylor & Francis.
- Hardiman, F. Budi. (2015). *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernisme, Diskursus Filosofis Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius.

- Herry-Priyono, B. (2016). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hettne, B. (2001). *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (Vol. 8). Verso Books
- Layder, D. (2005). *Understanding Social Theory*. Sage.Publication.
- Maryolo, A. (2018). *Development As Freedom Dan Pencapaian Perubahan Sosial*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12 (2), 367-380.
- Suseno, F Magnis-. (1999). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lin, E. (2022). How War Changes Land: Soil Fertility, Unexploded Bombs, and the Underdevelopment of Cambodia. *American Journal of Political Science*, 66 (1), 222-237.
- Mandel, Erns & George Novak, (1970) *The Marxist Theory of Alienation, Three Essays*, New York, Pathfinder Press
- McRobbie, A., & Mcrobbie, A. (2003). *Postmodernism and Popular Culture*. Routledge.
- Ozoigbo, B. I. (2019). Insecurity in Nigeria: genesis, consequences and panacea. *European Journal of Social Sciences Studies*.
- Payne, Michael.(1997). *Reading knowledge: An Introduction to Barthes, Foucault and Althusser*, Blackwell Publishers
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Sociological Theory*. Sage publications.
- Sarup, M. (1993). *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*. Pearson Education.
- Setiawan, F. (2019). *Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia*. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8 (2), 1-11.
- Songsore, J. (2020). The Urban Transition in Ghana: Urbanization, National Development and Poverty Reduction. *Ghana Social Science Journal*, 17 (2), 57-57.
- Sugiharto, I. (2014). *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta Kanisius.
- Sumaryono, E. (1993). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta Kanisius.
- Swingewood, Alan. (1975), *Marx and Modern Social Theory*;The Macmilan Press
- Sztompka, P. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta, Prenada Media Group
- Turner, J. H., & Turner, P. R. (1978). *The Structure of Sociological Theory*. Homewood, IL: Dorsey Press
- Weber, M. (2019). Economy and Society. In *Economy and Society*. Harvard University Press.